

DOKUMEN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL TAHUN 2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Berita acara dalam melakukan tindak lanjut atas temuan, dengan menggunakan template berikut ini:

	FORMULIR	No. Dok : RTM- AMI/UN7.FH/PJ/II/2025
	RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Halaman : 1 dari 22

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025

Jam : 13.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama, Gedung Satjipto Rahardjo, Tembalang

Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Pimpinan Rapat : Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan
Pimpinan Rapat : 

Jabatan
Pimpinan Rapat : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Hasil Rapat : Tuliskan hasil yang penting dari rapat, secara urut:

1. Membuat Renstra Fakultas Hukum : Catatan posisi strategis program studi dibuat detail begitu juga SOTK
2. Pembentukan peta jalan penelitian dan pengabdian (setelah ada peta jalan penelitian dan pengabdian tetapi saat ini tidak ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap penelitian dan pengabdian)
 - a. Harus ada kategorisasi skripsi, tesis, dan disertasi terhadap dosen DTSP yang melakukan pengajaran pada program studi
 - b. Perlu ada peningkatan dalam kategorisasi pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi selaras dengan peta jalan penelitian
3. Penguatan dokumentasi terhadap semua kegiatan karena terkait dengan AMI khususnya yang menunjukkan fakultas hukum sebagai pusat rujukan ilmiah
4. Pengabdian melibatkan mahasiswa di setiap program studi

5. Pendataan tugas akhir pada masing-masing program studi sehingga setiap penelitian DTSPS dimohon memasukkan nama mahasiswa masing-masing prodi (S1-S2-S3)

Terdapat beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan oleh program studi dan gugus penjaminan mutu, yakni :

1. Buku Pedoman dan Kurikulum program studi sebaiknya di SK kan
2. Melakukan kategorisasi terhadap penelitian dosen dan judul tugas akhir mahasiswa
3. Melakukan survey terhadap stakeholders
4. Mulai mempersiapkan akreditasi : mohon memperhatikan data di SIPEMUTU
5. Memperhatikan rasio dosen tidak tetap pada

Hasil analisis terhadap hasil AMI Program Magister Hukum :

1. Profil UPPS yang menunjukkan bahwa Fakultas Hukum menjadi rujukan dalam bidang keilmuannya : masukkan rangking FH di WUR, FGD yang menunjukkan institusi lain hadir untuk meminta pandangan dari pakr UNDIP, seminar di FH, keterlibatan dosen FH UNDIP sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah.
2. Kriteria C.8. yakni mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat : Dalam hal ini perlu peta jalan pengabdian, dan evaluasi kesesuaian dosen dengan peta jalan pengabdian.

Hasil analisis terhadap hasil AMI Magister Kenotariatan :

1. AMI MKn perlu adanya survey kepada alumni yang menjadi Notaris atau kerja di BPN
2. Kesesuaian antara penelitian Tesis mahasiswa dengan penelitian DTSPS
3. Dosen perlu mencantumkan nama mahasiswa dalam keterlibatan penelitian dan pengabdian.

Hasil analisis terhadap hasil AMI Program Doktor Hukum

1. Kriteria C.5 dan C.6 masih perlu ditingkatkan
2. Bagian Keuangan, sarana dan prasarana

Butir Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas Temuan Audit Mutu Internal menggunakan template berikut ini:

	FORMULIR	No. Dok : RTM-AMI/UN7.FH/PJ/II/2025
	RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Halaman : 2 dari 3

No	Indikator dengan Temuan Negatif (0-2)	Program Studi	Program Kerja (sebagai Tindak Lanjut untuk mengatasi Temuan Negatif)	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Sarjana Hukum Doktor Hukum	Peningkatan Alokasi Dana Guna Pengelolaan Program Sarjana Hukum dan Doktor Hukum. Peningkatan kualitas sarana prasarana yang inklusif	70%	30%	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Pimpinan Program Studi	
2	Penilaian Pembelajaran	Sarjana Hukum	Pembentukan Buku Panduan Penilaian Pembelajaran Pembuatan Rubrik Penilaian	80%	25%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pimpinan Program Studi	
3	Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan	Sarjana Hukum	Pelaksanaan survey secara berkala terhadap seluruh stake holder termasuk pengguna lulusan	75%	30%	Pimpinan Program Studi	

No	Indikator dengan Temuan Negatif (0-2)	Program Studi	Program Kerja (sebagai Tindak Lanjut untuk mengatasi Temuan Negatif)	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
				Target	Realisasi		
4	Profil UPPS	Magister Hukum	<p>Penekanan Profil UPPS pada Pembuatan Renstra</p> <p>Penguatan Kegiatan dan Dokumentasinya Yang Menunjukkan Fakultas Hukum Menjadi Rujukan Ilmiah</p>	80%	40%	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p>Manager Fakultas Hukum</p>	
5	Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Magister Hukum</p> <p>Magister Kenotariatan</p> <p>Doktor Hukum</p>	<p>Pembentukan Peta Jalan Pengabdian</p> <p>Melakukan evaluasi kesesuaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Peta Jalan Pengabdian</p> <p>Peningkatan kualitas Pengabdian</p>	75%	50%	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p>Pimpinan Program Studi</p> <p>Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	
6	Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tesis	Magister Kenotariatan	<p>Pembentukan Peta Jalan Penelitian</p> <p>Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan Peta Jalan Penelitian</p> <p>Melakukan Pendataan Terhadap Penelitian DTSP</p>	80%	50%	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ,</p> <p>Pimpinan Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	

No	Indikator dengan Temuan Negatif (0-2)	Program Studi	Program Kerja (sebagai Tindak Lanjut untuk mengatasi Temuan Negatif)	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
				Target	Realisasi		
			yang menjadi rujukan dalam pembuatan/penulisan tesis				
7	Kriteria Dosen Tidak Tetap	Magister Kenotaritan	Rasionalisasi jumlah dosen tidak tetap yang mengajar pada program studi	70%	30%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Program Studi	
8	Bidang Kerja	Magister Kenotariatan	Pelaksanaan survey terhadap lulusan Melakukan Kerjasama dengan institusi yang selaras dengan kompetensi lulusan Magister Kenotariatan	90%	60%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Program Studi	

Semarang, 5 Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

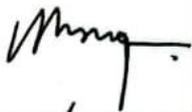
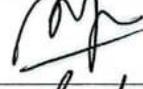
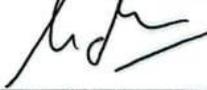
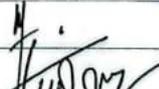
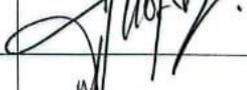
DOKUMENTASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN FAKULTAS HUKUM

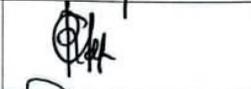
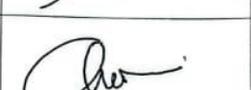
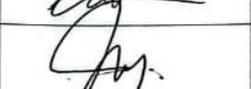
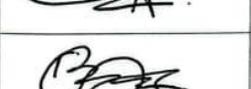
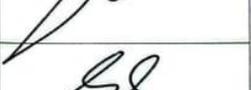




**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
FAKULTAS HUKUM UNDIP TAHUN 2025**

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
 Jam : Pukul 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Utama, Gedung Stajipto Rahardjo, Fakultas Hukum UNDIP, Tembalang
 Agenda Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen dan Koordinasi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

No	Nama	Jabatan/Posisi	Tanda Tangan
1	Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.	Ketua Program Studi S1 Hukum	
3	Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Magister Hukum	
4	Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.	Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	
5	Dr. Sukirno, S.H., M.Si	Ketua Program Studi Doktor Hukum	
6	Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi Doktor Hukum	
7	Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I, M.H.	Sekretaris Program Studi Magister Hukum	
8	Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan	
9	Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi S1 Hukum	
10	Yunarso Hendrianto, S.E.	Manager Fakultas Hukum	
11	Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	
12	Willy Naresta Hanum, S.H., M.H.	Sekretaris Tim Penjaminan Mutu Fakultas	
13	Ahmad Nur Shadiq, S.H., M.H.	Anggota Tim Penjaminan Mutu Fakultas	

14	Aista Wisnu Putra, S.H., M.H.	Anggota Tim Penjaminan Mutu Fakultas	
15	Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.	Anggota Tim Penjaminan Mutu Fakultas	
16	Ardina Nur Amalia, S.H., M.H.	Ketua GPM Prodi Sarjana Hukum	
17	Muhammad Ramdan, S.H., M.H.	Anggota GPM Prodi Sarjana Hukum	
18	Putri Ayu Sutrisno, S.H., M.H.	Anggota GPM Prodi Sarjana Hukum	
19	Irawati, S.H., M.H.	Ketua GPM Prodi Magister Hukum	
20	Fajar Prima Julian, S.H., M.H.	Anggota GPM Prodi Magister Hukum	
21	Muhamad Nafi'uz Zaman, S.H., M.H.	Anggota GPM Prodi Magister Hukum	
22	Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.	Ketua GPM Prodi Magister Kenotariatan	
23	Benediktus Satriyo Wibowo, S.H., M.Kn.	Anggota GPM Prodi Magister Kenotariatan	
24	Bunga Jasmine Puji Hapsari, S.H., M.Kn.	Anggota GPM Prodi Magister Kenotariatan	
25	Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum.	Ketua GPM Prodi Doktor Hukum	
26	Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H.	Anggota GPM Prodi Doktor Hukum	
27	M. Asadullah Hasan Al Asy'arie, S.H., M.Kn.	Anggota GPM Prodi Doktor Hukum	

ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Sistem penjaminan mutu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui akreditasi. Kedua sistem penjaminan mutu ini saling terkait karena hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik akan menghasilkan akreditasi yang baik. Universitas Diponegoro sebagai salah satu *leading university* di Indonesia secara konsisten melaksanakan kedua sistem penjaminan mutu tersebut secara sistematis dan berkelanjutan utamanya pada sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan berdasarkan siklus Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi Standar Dikti, Pengendalian Standar Dikti dan Peningkatan Standar Dikti (PPEPP). Bagian penting dari siklus PPEPP tersebut adalah evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang dilaksanakan melalui Audit Internal Mutu Akademik dan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan di setiap fakultas termasuk Fakultas Hukum UNDIP.

Rapat Tinjauan Manajemen di Fakultas Hukum dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Audit Internal Mutu Akademik yang dilaksanakan terhadap Unit Program Studi (UPS) yang terdiri dari Program Studi Sarjana Hukum, Program Studi Magister Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Doktor Hukum. Ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Mutu yang dilaksanakan sebelumnya berkaitan dengan langkah-langkah perbaikan mutu yang akan dilaksanakan sehingga terjadi peningkatan kualitas dari pengelolaan Fakultas dan program studi di masa yang akan datang.

Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Fakultas Hukum menjadi sangat penting untuk mempertahankan kualitas fakultas khususnya aspek internasionalisasi disebabkan terdapat dua Program Studi pada Fakultas Hukum yang terakreditasi internasional oleh lembaga Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) yakni Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum yang secara otomatis juga terakreditasi unggul. Adapun Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Doktor Hukum juga telah mendapatkan akreditasi Unggul.

Kualitas Audit Internal Mutu Akademik termasuk Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Hukum yang baik menjadi salah satu hal penting dalam menunjang tercapainya visi Fakultas Hukum yakni Fakultas Hukum yang progresif berdasarkan nilai-nilai Pancasila menuju pengembangan keilmuan yang berbasis riset berkelas dunia pada tahun 2025 serta visi Universitas Diponegoro yakni “Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul”.

B. Tujuan

Rapat Tinjauan Manajemen ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yakni :

1. Tindak lanjut hasil Audit Internal Mutu Akademik yang dilaksanakan oleh LP2MP UNDIP terhadap Program Studi dalam lingkup Fakultas Hukum.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rapat penjaminan mutu baik pada tingkat fakultas hukum dan program-program studi dalam lingkup fakultas hukum;
3. Mengumpulkan input/bahan penyusunan Rencana Tindak Lanjut guna meningkatkan kualitas pendidikan pada Fakultas Hukum dan program-program studi dalam lingkup fakultas hukum;

C. Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan dengan melibatkan pimpinan Fakultas Hukum UNDIP, Pengelola Program Studi dalam lingkup Fakultas Hukum, Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum serta Gugus Penjaminan Mutu pada setiap Program Studi dalam ruang lingkup Fakultas Hukum UNDIP.

Adapun agenda pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen ini adalah :

1. Mengidentifikasi indikator-indikator yang perlu ditingkatkan dalam penjaminan mutu berdasarkan hasil Audit Internal Mutu Akademik baik pada tingkatan UPS sehingga dapat diketahui langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pemenuhan indikator-indikator dalam AIMA
3. Mengidentifikasi progres atau kemajuan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen

D. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut dari RTM Sebelumnya

Salah satu agenda penting dalam Rapat Tinjauan Manajemen ini adalah mengevaluasi progress dari rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya.

Adapun evaluasi tersebut dapat dideskripsikan dalam tabel berikut :

Rencana Kerja	Progress	Hambatan
Pembuatan Dokumen SPMI Fakultas Hukum	Dilaksanakan	-

	Telah dibuat dokumen SPMI terkait Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Diajukan kepada pimpinan untuk direvisi	
Survey kepada dosen dan mahasiswa terkait kualitas pendidikan termasuk proses belajar mengajar.	<i>On progress :</i> Dilakukan pengumpulan data terhadap dosen dan mahasiswa terkait proses belajar yang dilaksanakan pada masing-masing program studi.	Terdapat beberapa agenda yang bersamaan diantaranya perubahan kurikulum pada program studi pasca terbitnya Permendikbud 53 tahun 2023
Pembuatan Peta Jalan Penelitian dan Peta Jalan Pengabdian	Dilaksanakan namun Akan Berubah Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Induk Penelitian UNDIP	Saat ini telah terdapat peta jalan penelitian sementara yang disesuaikan dengan RIP UNDIP Tahun 2020-2024
Pembuatan <i>Best Practice</i> Fakultas Hukum UNDIP	Dilaksanakan	Terdapat dokumen best practice yang telah ditandatangani Dekan dan telah dijabarkan dalam indikator-indikator pemenuhannya

E. Dampak Eksternal dan Internal yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan

Sistem manajemen mutu pendidikan pada Fakultas Hukum UNDIP akan memberikan dampak internal dan eksternal. Adapun dampaknya secara internal adalah pengembangan Fakultas Hukum baik dari sisi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tri darma perguruan tinggi.

Adapun dari sisi pendidikan yakni pengembangan kualitas pendidikan di Fakultas Hukum baik dalam proses belajar mengajar, peningkatan kualitas pengajar serta pengembangan kurikulum. Pada sisi penelitian adalah pengembangan penelitian pada Fakultas Hukum berdasarkan peta jalan penelitian sehingga penelitian bersifat tematik dan dapat terlaksana dengan baik. Di sisi

lain, ini juga membawa dampak positif pada pengabdian kepada masyarakat sehingga UNDIP dapat lebih kontributif pada masyarakat.

F. Informasi tentang Kinerja dan Efektifitas Sistem Manajemen Mutu di Fakultas Hukum

F.1. Laporan Survei Kepuasan

Survey kepuasan pada Fakultas Hukum dilakukan terhadap dosen dan mahasiswa guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma pada Fakultas Hukum UNDIP. Adapun survey kepuasan pada Fakultas Hukum UNDIP adalah :

Jenis Survey	Target	Tujuan	Progress
Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM)	Mahasiswa (Setiap individu)	Dilakukan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran	Dilaksanakan secara terus menerus setiap akhir semester.
Survey yang diselenggarakan TPMF dan GPM	Dosen	Dilakukan untuk mengetahui kualitas mengenai pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk pengembangan kemahasiswaan dan pengelolaan sarana prasarana	Sedang melakukan penyebaran kuisisioner atau angket
Survey yang diselenggarakan TPMF dan GPM	Mahasiswa (sampling)	Dilakukan untuk mengetahui kualitas mengenai pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk pengembangan kemahasiswaan dan pengelolaan sarana prasarana	Sedang melakukan penyebaran kuisisioner atau angket

F.2. Ketercapaian Tujuan PBM

Berikut diuraikan mengenai pemenuhan aspek pembelajaran pada masing-masing prodi di Fakultas Hukum UNDIP:

	Sarjana Hukum	Magister Hukum	Magister Kenotariatan	Doktor Hukum
Kurikulum	V	V	V	V

Karakteristik Proses Pembelajaran	V	V	V	V
Rencana Proses Pembelajaran	V	V	V	V
Pelaksanaan Proses Pembelajaran	V	V	V	V
Monitoring Hasil Pembelajaran	V	V	V	V
Penilaian Pembelajaran	V	V	V	V

F.4. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Program Studi Sarjana Hukum (S1)

Pencapaian program studi Sarjana Fakultas Hukum UNDIP berada pada urutan 31 dari 35 program studi sarjana yang berada dalam klaster akreditasi internasional. Artinya, perlu ada peningkatan dan optimalisasi capaian dari Prodi sehingga mencapai nilai maksimal

Pembahasan yang lebih detail terkait audit mutu internal tahun 2024 yang dilaksanakan pada Program Studi Sarjana Hukum dapat dilihat pada table berikut :

No	Fakultas	Program Studi Sarjana	Akreditasi	Kriteria A	Kriteria B	Kriteria C								Kriteria D				Rata-Rata	
						Sub Kriteria 1	Sub Kriteria 2	Sub Kriteria 3	Sub Kriteria 4	Sub Kriteria 5	Sub Kriteria 6	Sub Kriteria 7	Sub Kriteria 8	Sub Kriteria 9	Sub Kriteria 1	Sub Kriteria 2	Sub Kriteria 3		Sub Kriteria 4
1	Fakultas Hukum	S1- Hukum	Internasional	4	4	4	3.88	3.78	3.69	3.41	3.27	4	4	3.65	3	4	4	4	3.78
	Rata-rata			4	4	4	3.875	3.777	3.685	3.405	3.267	4	4	3.651	3	4	4	4	3.777
	Persentase			100%	100%	100%	94%	94%	92%	85%	82%	100%	100%	91%	75%	100%	100%	100%	94%

Berdasarkan table tersebut tampak bahwa beberapa indikator pada program sarjana masih berada dibawah 90 % dan bahkan satu indikator berada dibawah 80%. Adapun indikator yang perlu mendapat perhatian dalam Audit Mutu Internal Program Sarjana adalah :

- Kriteria C5: Keuangan, sarana dan prasarana (85%)
- Kriteria C6 : penilaian pembelajaran (82%)
- Kriteria C9: Tingkat kepuasan pengguna lulusan (91%)

Terdapat satu indikator yang sangat perlu untuk mendapat perhatian yakni indikator D1, yakni Analisis dan Capaian Kinerja dengan nilai 75%

Indikator nilai 0-1 (Dasar Penyusunan Rencana Tindak Lanjut) Sarjana FH

No	Fakultas	Program Studi	Indikator	
			Nilai 0	Nilai 1
1	FH	S1-HUKUM	-Keuangan, sarana dan prasarana (0,43) - Penilaian pembelajaran (0,00)	

Indikator-indikator yang belum maksimal tersebut tentu perlu dioptimalisasi dengan berbagai Langkah-langkah strategis.

Jika dibandingkan dengan hasil Audit Mutu Internal di tahun 2023 maka terdapat peningkatan signifikan pada aspek mutu di Program Sarjana Fakultas Hukum UNDIP. Pada tahun 2023, terdapat dua indikator yang menjadi masalah adalah relevansi penelitian dan waktu tunggu lulusan. Pada tahun 2024, kedua aspek ini sudah diselesaikan dengan baik dan target-target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Program Studi Magister

Fakultas Hukum memiliki 2 Program Studi S2 yang meliputi Hukum dan Kenotariatan.

No	Fakultas	Program Studi Sarjana	Akreditasi	Kriteria A	Kriteria B	Kriteria C									Kriteria D				Jumlah
						Sub Kriteria 1	Sub Kriteria 2	Sub Kriteria 3	Sub Kriteria 4	Sub Kriteria 5	Sub Kriteria 6	Sub Kriteria 7	Sub Kriteria 8	Sub Kriteria 9	Sub Kriteria 1	Sub Kriteria 2	Sub Kriteria 3	Sub Kriteria 4	
1	Fakultas Hukum	S2-Hukum	Internasional	3.25	3	3.58	3.53	3.78	3.59	3.87	3.31	3.58	3	3.4	4	4	4	4	3.67
2	Fakultas Hukum	S2-Kenotariatan	Tidak Internasional	4	4	3.83	3.88	4	3.26	3.59	3.94	2.33	2	3.33	4	4	4	4	3.55
Rata-rata				3.625	3.5	3.708	3.703	3.888	3.427	3.73	3.622	2.958	2.5	3.365	4	4	4	4	3.608
Persentase				91%	88%	93%	93%	97%	86%	93%	91%	74%	63%	84%	100%	100%	100%	100%	90%

Indikator nilai 0-1 (Dasar Penyusunan Rencana Tindak Lanjut) Magister FH

No	Fakultas	Program Studi	Indikator	
			Nilai 0	Nilai 1
1	FH	S2-HUKUM	- Masa studi (0,00)	
2		S2-KENOTARIATAN	-Kesesuaian dengan bidang kerja (0,37)	-Dosen tidak tetap (1,30) - Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. (1,00)

Hasil pengolahan data AMI 2024 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator pada prodi S2 di Fakultas Hukum yang memiliki nilai 0 dan 1. Secara umum, beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian karena capaian yang masih minim. Indikator tersebut antara lain:

1. Kriteria C4: Dosen Tidak Tetap
2. Kriteria C7: Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir
3. Kriteria C9: Masa Studi
4. Kriteria C9: Kesesuaian dengan bidang kerja

Pada Magister Hukum terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya masih di bawah 80%, yakni:

1. Profil UPPS yang menunjukkan bahwa Fakultas Hukum menjadi rujukan dalam bidang keilmuannya : Masukkan rangking FH di WUR, FGD yang menunjukkan institusi lain hadir untuk meminta pandangan dari pakar UNDIP, seminar di FH, keterlibatan dosen FH UNDIP sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan ilmiah.
2. Kriteria C.8. yakni mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat : Dalam hal ini perlu peta jalan pengabdian, dan evaluasi kesesuaian dosen dengan peta jalan pengabdian

Pada Program Magister Kenotariatan terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya masih dibawah 80%, yakni :

1. Kriteria C. 7 : Perlu Ada Peta Jalan Penelitian; Daftar Penelitian Dosen dan Mahasiswa; Evaluasi Terhadap Kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan Penelitian, Perbaikan Penelitian Pasca Evaluasi. Penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
2. Kriteria C.8. : Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

3. Kriteria Dosen Tidak Tetap : Diukur dari perbandingan antara jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah.
4. Jumlah kesesuaian dengan bidang kerja

Program Doktor Hukum

Fakultas Hukum memiliki 1 Program Studi S3 Hukum. Adapun hasil audit dari Program Doktor Hukum terhadap setiap indicator dapat dilihat dalam table berikut :

No	Fakultas	Program Studi Sarjana	Akreditasi	Kriteria A	Kriteria B	Kriteria C								Kriteria D				Rata-Rata	
						Sub Kriteria 1	Sub Kriteria 2	Sub Kriteria 3	Sub Kriteria 4	Sub Kriteria 5	Sub Kriteria 6	Sub Kriteria 7	Sub Kriteria 8	Sub Kriteria 9	Sub Kriteria 1	Sub Kriteria 2	Sub Kriteria 3		Sub Kriteria 4
1	Fakultas Hukum	S3-Hukum	Internasional	4	4	4	3.88	3.78	3.69	3.41	3.27	4	4	3.65	3	4	4	4	3.78
Rata-rata				4	4	4	3.875	3.777	3.685	3.405	3.267	4	4	3.651	3	4	4	4	3.777

Berdasarkan table di atas, rata-rata pencapaian Program Studi Doktor Hukum untuk setiap kriteria sangat baik dan hanya satu kriteria yang pencapaiannya dibawah 80% yaitu Kriteria D1 yakni analisis capaian kinerja yang mengedepankan keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari program Doktor Hukum, yakni :

1. Keuangan, sarana dan prasarana
2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat DTSP yang relevan dalam tiga tahun terakhir

Adapun skor indicator yang didapatkan untuk kedua hal tersebut adalah:

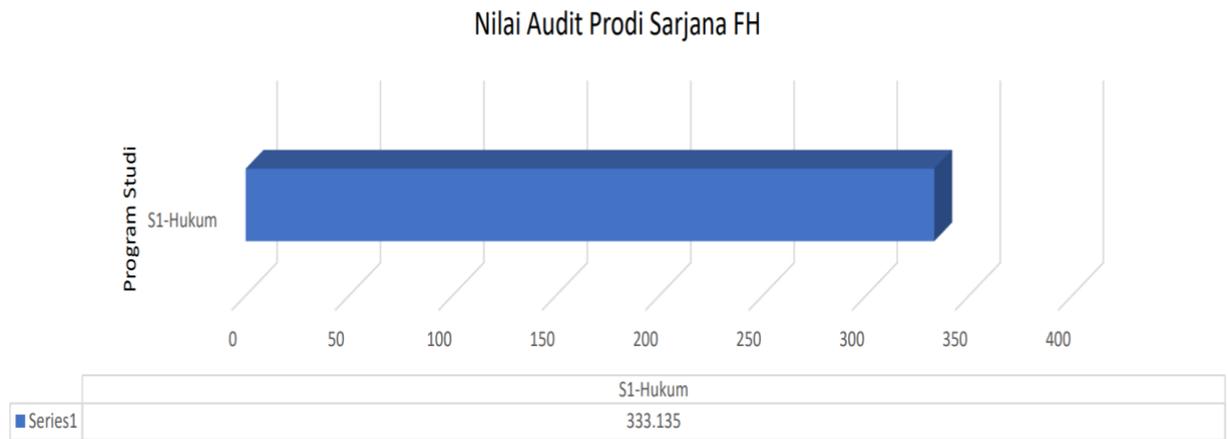
No	Fakultas	Program Studi	Indikator	
			Nilai 0	Nilai 1
1	FH	S3-HUKUM	- Keuangan, sarana dan prasarana (0,26) - Kegiatan PKM DTSP yang relevan 3 tahun terakhir (0,92)	

F.5. Monitoring dan Pengukuran Hasil

Berdasarkan hasil Audit Internal Mutu Akademik maka tampak bahwa semua Program Studi pada Fakultas Hukum UNDIP mendapatkan hasil yang sangat baik sebagaimana berikut:

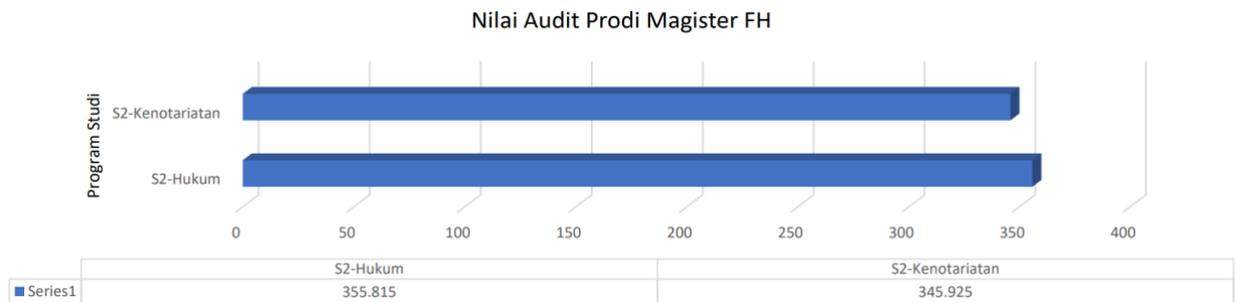
Program Studi Sarjana Hukum

Program Studi S1 Hukum memberikan performansi yang sangat baik dengan pencapaian nilai total diatas 80%



Program Studi Magister

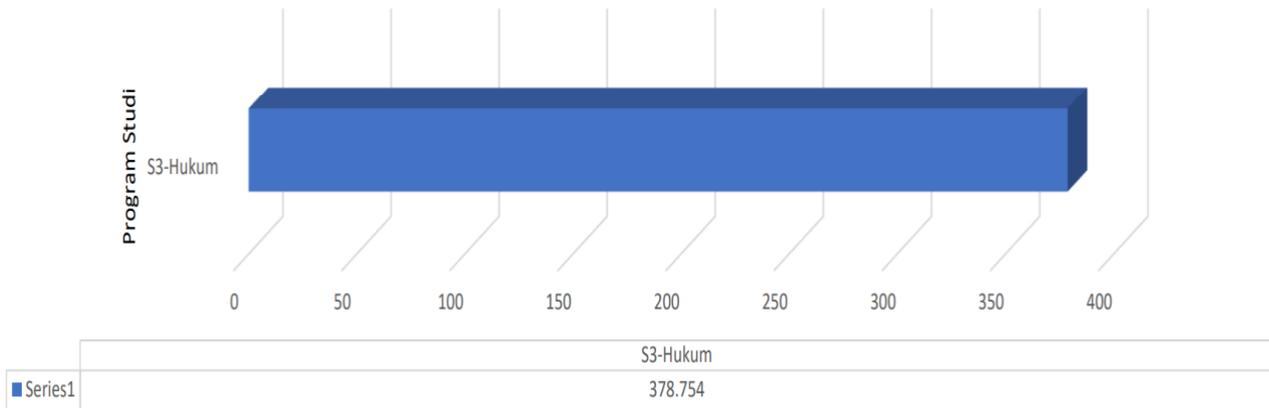
Sebanyak 2 prodi di Fakultas Hukum yaitu S2 Hukum dan S2 Kenotariatan memberikan performansi yang sangat baik dengan pencapaian nilai total diatas 80%



Program Studi Doktor

Program Studi S3 Hukum memberikan performansi yang sangat baik dengan pencapaian nilai total diatas 80%.

Nilai Audit Prodi Doktor FH



G. Penetapan Sasaran Mutu

Sasaran mutu dan capainnya pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, adalah :

Sasaran Mutu FH UNDIP	Capaian
Peningkatan internasionalisasi pada Fakultas Hukum UNDIP melalui berbagai program baik dalam bidang pendidikan maupun penelitian guna mendukung visi Universitas Diponegoro yakni UNDIP menjadi Universitas Riset yang Unggul.	Fakultas Hukum UNDIP secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan berbagai program internasionalisasi diantaranya <i>summer course, visiting professor/visiting lecturer, joint research</i> , pertukaran mahasiswa melalui program IISMA dengan universitas di luar negeri
Mendukung tahapan pencapaian visi Universitas Diponegoro menuju World Class University yang menjadi rujukan dunia pada tahun 2039	Terdapat dua program studi pada Fakultas Hukum UNDIP yang telah terakreditasi internasional oleh lembaga Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) yakni Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum.
Pencapaian akreditasi unggul pada semua program studi dalam lingkup Fakultas Hukum UNDIP pada tahun 2024 dan Akreditasi internasional pada program studi	Tiga Program Studi yakni Program Studi Sarjana Hukum, Program Studi Magister Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Doktor Hukum sudah terakreditasi unggul

<p>Pelaksanaan tata kelola yang didasarkan pada prinsip <i>best practice</i> pada tingkat fakultas, program studi, bagian dan semua unit dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p>	<p>Proses pengelolaan pada Fakultas Hukum dan program studi sudah didasarkan pada <i>best practices</i> yang telah ditetapkan oleh Dekan dan pencapaiannya dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan</p>
--	---

H. Kecukupan Sumber Daya

Berdasarkan data dosen pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah 124 orang dan 20 diantaranya bergelar Professor atau Guru Besar.

Prestasi

The screenshot displays the QS World University Rankings by Subject 2022 for Law & Legal Studies. The search results table is as follows:

Rank	University	Overall score	H-index/Citations	Citations per Paper
301-340	Diponegoro University Semarang, Indonesia	48.5	48.5	56.4

No	Indikator dengan Temuan Negatif (0-2)	Program Studi	Program Kerja (sebagai Tindak Lanjut untuk mengatasi Temuan Negatif)	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Sarjana Hukum Doktor Hukum	Peningkatan Alokasi Dana Guna Pengelolaan Program Sarjana Hukum dan Doktor Hukum. Peningkatan kualitas sarana prasarana yang inklusif	70%	30%	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Pimpinan Program Studi	
2	Penilaian Pembelajaran	Sarjana Hukum	Pembentukan Buku Panduan Penilaian Pembelajaran Pembuatan Rubrik Penilaian	80%	25%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pimpinan Program Studi	
3	Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan	Sarjana Hukum	Pelaksanaan survey secara berkala terhadap seluruh stake holder termasuk pengguna lulusan	75%	30%	Pimpinan Program Studi	
4	Profil UPPS	Magister Hukum	Penekanan Profil UPPS pada Pembuatan Renstra Penguatan Kegiatan dan Dokumentasinya	80%	40%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	

No	Indikator dengan Temuan Negatif (0-2)	Program Studi	Program Kerja (sebagai Tindak Lanjut untuk mengatasi Temuan Negatif)	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
				Target	Realisasi		
			Yang Menunjukkan Fakultas Hukum Menjadi Rujukan Ilmiah			Manager Fakultas Hukum	
5	Pengabdian Kepada Masyarakat	Magister Hukum Magister Kenotariatan Doktor Hukum	Pembentukan Peta Jalan Pengabdian Melakukan evaluasi kesesuaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Peta Jalan Pengabdian Peningkatan kualitas Pengabdian	75%	50%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Program Studi Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
6	Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis	Magister Kenotariatan	Pembentukan Peta Jalan Penelitian Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan Peta Jalan Penelitian Melakukan Pendataan Terhadap Penelitian DTPS	80%	50%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan , Pimpinan Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	

No	Indikator dengan Temuan Negatif (0-2)	Program Studi	Program Kerja (sebagai Tindak Lanjut untuk mengatasi Temuan Negatif)	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
				Target	Realisasi		
			yang menjadi rujukan dalam pembuatan/penulisan tesis				
7	Kriteria Dosen Tidak Tetap	Magister Kenotariatan	Rasionalisasi jumlah dosen tidak tetap yang mengajar pada program studi	70%	30%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Program Studi	
8	Bidang Kerja	Magister Kenotariatan	Pelaksanaan survey terhadap lulusan Melakukan Kerjasama dengan institusi yang selaras dengan kompetensi lulusan Magister Kenotariatan	90%	60%	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Program Studi	